

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kondisi untuk ketersediaan Trotoar, sebagian belum memenuhi syarat. syarat lebar bagi kaum difabel adalah 1,50m sedangkan sesuai penelitian, ada Trotoar yang lebarnya dibawah 1,50m yang terdapat pada: Kelurahan Oetete STA 0+500 memiliki lebar bagian kiri dan kanan 1,30m, di kelurahan Fatululi pada STA 0+000, 0+400 dan 0+500 memiliki lebar trotoar kiri: 1,25, 1,30,1,30 dan kanan: 1,30, 1,30,1,35, di Kelurahan Kayu Putih memiliki lebar trotoar 1m di STA 0+500-700 pada bagian kiri, di kelurahan Oebufu sebagian besar tidak memenuhi syarat, hanya dua titik saja yang memenuhi syarat dengan lebar 1,70 di STA 0+400 di bagian kanan dan 1,50 STA 0+600 di bagian kanan, dan di Kelurahan TDM semuanya tidak memenuhi syarat karena lebar trotoar yang di dapat semuanya memiliki lebar 1,10m, sedangkan untuk lokasi di kelurahan Liliba semuanya memenuhi syarat karena lebar trotoar semua diatas 1,50m.
2. Untuk fasilitas pejalan kaki bagi kaum difabel seperti ubin pengarah dan ubin peringatan (TGSI) juga sebagian besar di trotoar dari setiap lokasi belum memiliki ketersediaan TGSI untuk kaum difabel khususnya di Kelurahan Oebufu dan Tuak dun Merah (TDM)

5.2 . Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran terkait dengan Aksesibilitas Trotoar bagi kaum difabel.

1. Perlu adanya TGSi bagi kaum difabel di sepanjang Trotoar sehingga mempermudah bagi kaum difabel untuk berjalan. (Mengarahkan dan memberi peringatan kepada kaum difabel).
2. Pemerintahan kota Kupang harus menerbitkan serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang memuat tentang pelayanan fisik maupun non fisik yang berfokus pada kepentingan dan kebutuhan yang benar-benar sesuai dengan harapan para penyandang disabilitas, yang dalam ini adalah mengenai ketersediaan TGSi agar penyandang disabilitas mudah untuk mengakses atau menggunakannya.
3. Setiap fasilitas terutama aksesibilitas trotoar bagi penyandang kaum difabel harus dibangun berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan sehingga kedepannya penyandang disabilitas bisa mudah untuk mengakses, serta memperhatikan keselamatan dan juga menjadi penyandang disabilitas yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen PU, 2006. "Aksesibilitas" Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006
- Dirjen Tata Ruang Nasional,n.d, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Dirjen Bina Marga, 1999 Persyaratan Aksesibilitas Pada Jalan Umum No.22/T/BM/1999
- Depertemen PU, 2006 "fasilitas public" Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N0.30/PRT/M/2006 .
- Dirjen Bina marga, 1995, jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki di perkotaan No. 027/T/Bt/1995
- Dewang, N. 2020. Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat. Jurnal PLANESATM. 1(1): 8-18.
- Pedo, Krisantus Satrio Wibowo, 2022 Manajemen Prasarana transportasi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Iqbal, 2012, Pengaruh Keberadaan Fasilitas Pelayanan Publik Terhadap Penurunan Kinerja Ruas Jalan (Studi kasus Rumah Sakit Harapan Bunda dan Cenpaka Lima, Tesis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Mujim, 2007, Dinamika pendidikan (penyediaan fasilitas public yang manusiawi bagi aksesibilitas difabel), No. 1/ThXIV/Mei 2007, Universitas Negeri Yogyakarta
- Mashuri dan Sigit mengutip dari Kurniawan, 2004, "factor yang menjadi pertimbangan agar jembatan penyeberangan orang memberikan manfaat maksimal bagi pejalan kaki"
- Noor, J, 2011, Metode penelitian skripsi Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah, penerbit Kencana
- Ullaq, 2013, Kajian Persepsi Masyarkat Terhadap Penderita Kawasan Masjid Raya Baiturahman Studi kasus (Jln. Mohamad Jam, Jln. Tgk Chik Pante kulu Dan jln. Cut A Jali), Tesis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh